



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDI MAPPASILING**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **631341**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 99.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/96 m2 di KUTAI TIMUR,  
HASIL SENDIRI Rp. 99.200.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 100.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
90.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 209.200.000

**III. HUTANG** Rp. 139.499.239

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 69.700.761

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ANDI YUSRI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **523241**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 115.000.000

1. Tanah Seluas 360 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 43.000.000

1. MOBIL, NISSAN TERRANO KINGSROAD K3 Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 60.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 218.000.000

**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 218.000.000

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BUDI WIBOWO**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **618903**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>600.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m <sup>2</sup> /70 m <sup>2</sup> di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>170.000.000</b>
1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 E MT CKD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>38.000.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>808.000.000</b>

**III. HUTANG** **Rp.** **183.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **625.000.000**

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 April 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : HAIRY ANSHARI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 505447

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 704.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/76 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 440.000.000
2. Tanah Seluas 220 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
4. Tanah Seluas 5000 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
5. Tanah Seluas 5000 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 14.100.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.600.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 2.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.058.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---





Sub Total	Rp.	728.658.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	728.658.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERNILAWATI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**
3. NHK : **523324**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	6.000.000
1. MOTOR, HONDA NC11CF1CA/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	5.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	11.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	11.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD IDRIS
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 523240

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.180.000.000

1. Tanah Seluas 330 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah Seluas 500 m2 di KUTAI TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 60.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/112 m2 di WAJO, WARISAN Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 52.896 m2 di WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/126 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 250 m2 di KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 19.000.000

1. MOTOR, SUZUKI UY 125 S AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 1 PA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.530.341**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---



Sub Total	Rp.	1.200.530.341
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.200.530.341

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SUB UNIT KERJA** : PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KUTAI TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SITI AKHLIS MUAFIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 622387

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 328 m<sup>2</sup>/126 m<sup>2</sup> di KUTAI TIMUR,  
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 11.000.000

1. MOTOR, HONDA SPD-MTR/SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI  
Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 212.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 212.000.000

---

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.